

Pengaruh Transfer Fiskal Pemerintah Pusat terhadap Kinerja Pembangunan Daerah: Bukti Empiris dari Empat Kabupaten di Pulau Sumba

Delvinyo E. Rede Huru^{1*}, Albertina C. A. Ina^{2*}, Risto Pindu Jawa^{3*},
Yuventus Ramompas⁴ & Yuniarti Reni Renggo⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Kristen Wira Wacana Sumba,
Jl. R. Suprpto No. 35, Prailiu, Kecamatan Kampera, Waingapu, Kabupaten Sumba Timur,
Nusa Tenggara Timur

*e-mail: devinumbuwgp@gmail.com

ABSTRAK

Artikel Info

Received :
24 June 2026

Revised :
29 June 2026

Accepted :
30 June 2026

Kata Kunci :
Transfer Fiskal, Indeks
Pembangunan Manusia,
Kinerja Pembangunan,
Sumba

Keywords :
*Fiscal Transfer, Human
Development Index,
Development Performance,
Sumba*

Pembangunan daerah di Pulau Sumba masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait ketimpangan pembangunan dan tingginya ketergantungan terhadap transfer fiskal dari pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transfer fiskal terhadap kinerja pembangunan daerah pada empat kabupaten di Pulau Sumba selama periode 2021–2025. Transfer fiskal yang dianalisis meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Kinerja pembangunan daerah diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Regional Bruto. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Data dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh masing-masing komponen transfer fiskal terhadap indikator pembangunan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia maupun Produk Domestik Regional Bruto. Sebaliknya, Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap kedua indikator tersebut, meskipun menunjukkan arah hubungan yang negatif. Secara bersama-sama, ketiga jenis transfer fiskal berpengaruh signifikan terhadap kinerja pembangunan daerah pada empat kabupaten di Pulau Sumba. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transfer fiskal masih memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, peningkatan efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan dana transfer diperlukan agar mampu memberikan dampak yang lebih optimal terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

The Effect of Central Government Fiscal Transfers on Regional Development Performance: Empirical Evidence from Four Regencies on Sumba Island

ABSTRACT

Regional development in Sumba Island has continued to face various challenges, particularly development disparities and a high dependence on fiscal transfers from the central government. This study aimed to examine the effect of fiscal transfers on regional development performance in four regencies of Sumba Island, namely East Sumba, West Sumba, Central Sumba, and Southwest Sumba, during the 2021–2025 period. The fiscal transfers analysed in this study consisted of the General Allocation Fund, the Special Allocation Fund, and the Revenue-Sharing Fund. Regional development performance was assessed using the Human Development Index and the Gross Regional Domestic Product. This study employed a quantitative approach using secondary data obtained from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and Statistics Indonesia. The data were analysed through multiple linear regression to identify the influence of each fiscal transfer component on regional development indicators. The results indicate that the General Allocation Fund and the Special Allocation Fund do not have a significant effect on either the Human Development Index or the Gross Regional Domestic Product. In contrast, the Revenue-Sharing Fund has a significant effect on both indicators, although the relationship is negative. Simultaneously, the three fiscal transfer components significantly influence regional development performance in the four regencies of Sumba Island. This study concludes that fiscal transfers remain an important instrument in supporting regional development. However, more effective management and utilisation of transferred funds are required to maximise their contribution to improving community welfare and promoting regional economic growth.

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan salah satu agenda utama pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (Hazmi, Karimi, & Muharja, 2023; Susilowati, *et al.*, 2025). Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus memperkuat kebijakan desentralisasi fiskal melalui peningkatan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebagai instrumen untuk mempercepat pembangunan di seluruh wilayah Indonesia (Paulina & Adiaty, 2025). Kebijakan ini merupakan implementasi dari otonomi daerah yang mulai diberlakukan sejak tahun 2001 dengan tujuan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Transfer fiskal tersebut diwujudkan melalui berbagai skema, antara lain Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa transfer fiskal memiliki peran penting dalam mendukung

pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan dana yang diterima (Ina & Hudang 2024).

Pulau Sumba merupakan salah satu kawasan strategis di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdiri dari 4 Kabupaten yaitu Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya (SBD). Meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar pada sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata, wilayah ini masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Berbagai indikator pembangunan menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten di Pulau Sumba masih berada pada kategori pembangunan menengah dan belum mampu mengejar capaian pembangunan nasional (Nofitiana, Huda, & Perdana, 2024). Berikut adalah gambar 1 data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAU, DAK dan DBH dalam 4 Kabupaten di Pulau Sumba dari tahun 2021 hingga 2025:



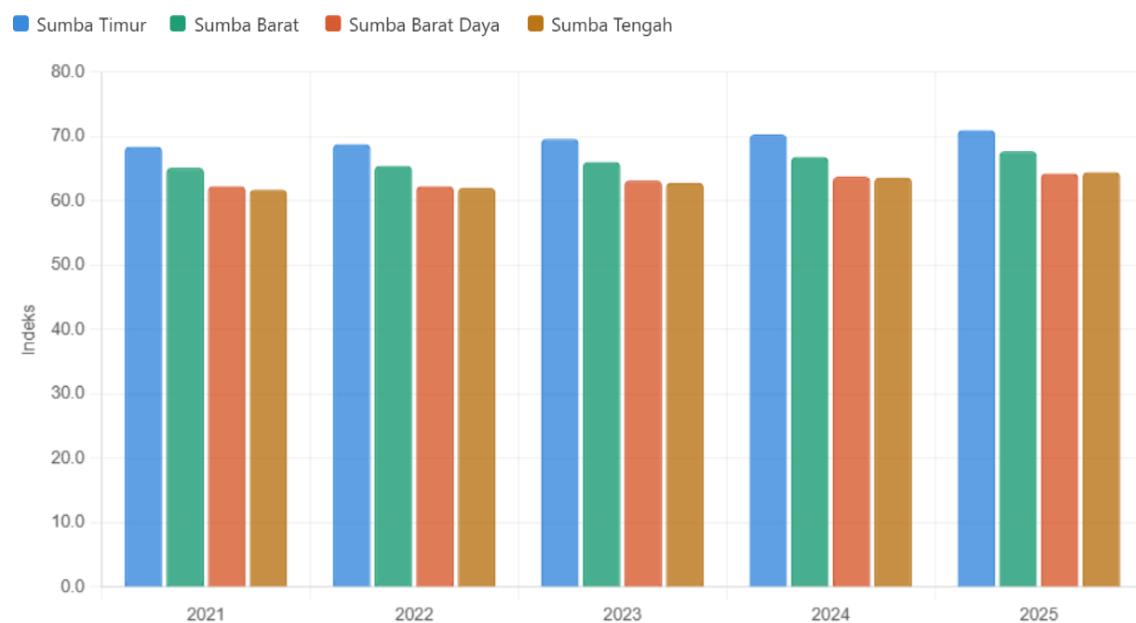
Sumber: Kemenkeu, 2026

Gambar 1. Perkembangan Dana Perimbangan di Empat Kabupaten Pulau Sumba Tahun 2021–2025 (dalam Miliar Rupiah)

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam gambar 1, secara keseluruhan transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada keempat kabupaten di Pulau Sumba dalam periode 2021–2025 didominasi oleh DAU sebagai komponen terbesar di setiap kabupaten, diikuti oleh DAK yang berfluktuasi cukup signifikan terutama pada Kabupaten SBD yang mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar Rp 380 miliar sebelum kemudian menurun tajam, sementara DBH menunjukkan pola penurunan yang konsisten dan seragam di seluruh kabupaten sejak tahun 2022 akibat perubahan formula bagi hasil pasca berlakunya UU HKPD No. 1 Tahun 2022, sehingga pada tahun 2023–2025 nilai DBH hampir tidak signifikan dibandingkan dua komponen lainnya. Kabupaten Sumba Timur secara konsisten menerima alokasi transfer fiskal tertinggi di antara keempat kabupaten, sementara Kabupaten Sumba Tengah menerima yang paling rendah di setiap tahunnya. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan fiskal antar kabupaten di Pulau Sumba yang perlu dikaji lebih dalam kaitannya dengan capaian kinerja pembangunan masing-masing daerah.

Dalam mengukur kinerja pembangunan daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan dua indikator yang sering

digunakan (Sabilla & Sumarsono, 2022; Sarpina, Putri, & Suroso, 2021). IPM menggambarkan capaian pembangunan manusia melalui dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, sedangkan PDRB mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi. Menurut penelitian Ina & Hudang (2023), peningkatan kualitas pembangunan manusia di daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya fiskal secara efektif. Sementara itu, pertumbuhan PDRB menunjukkan kapasitas ekonomi daerah yang dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, IPM dan PDRB menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana transfer fiskal mampu mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh, baik dari aspek sosial maupun ekonomi (Ina & Hudang, 2024; Nashshar & Mulyana, 2022).



Sumber: BPS NTT, 2026

Gambar 2. Perbandingan IPM Tahun 2021-2025: 4 Kabupaten Pulau Sumba

Berdasarkan gambar 2, IPM di empat kabupaten di Pulau Sumba menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sepanjang periode 2021–2025, meskipun laju pertumbuhannya tergolong lambat dan seluruh kabupaten masih berada di bawah rata-rata IPM Provinsi NTT. Sumba Timur secara konsisten mencatatkan IPM tertinggi di antara keempat kabupaten, yakni naik dari 68,42 pada tahun 2021 menjadi 70,99 pada tahun 2025, sementara Sumba Barat menempati posisi kedua dengan IPM 67,70 di tahun 2025. Di sisi lain, SBD dan Sumba Tengah masih berjalan berdampingan di angka terendah, masing-masing sebesar 64,27 dan 64,46 pada tahun 2025, dan yang menarik adalah Sumba Tengah yang menerima transfer fiskal paling kecil justru hampir menyamai IPM SBD yang menerima transfer lebih besar. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai seberapa efektif transfer fiskal yang diterima benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pembangunan manusia di masing-masing kabupaten.

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten di Pulau Sumba (miliar rupiah)

Tahun	Kabupaten			
	Sumba Timur	Sumba Tengah	Sumba Barat	Sumba Barat Daya
2021	4.011.750.000.000	767.260.000.000	1.452.220.000.000	2.355.320.000.000
2022	4.017.070.000.000	786.610.000.000	1.499.160.000.000	2.445.810.000.000
2023	4.243.450.000.000	809.490.000.000	1.554.660.000.000	2.520.840.000.000
2024	4.397.700.000.000	839.520.000.000	1.613.030.000.000	2.618.850.000.000
2025	4.506.770.000.000	882.050.000.000	1.697.120.000.000	2.739.340.000.000

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026.

Berdasarkan tabel 1, secara keseluruhan adanya tren peningkatan PDRB dari tahun 2021–2025, hal ini mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi riil di seluruh wilayah kabupaten se-Kepulauan Sumba. Sumba Timur memiliki nilai PDRB tertinggi dibandingkan kabupaten lainnya selama periode yang diamati, dengan nilai PDRB yang tumbuh dari Rp 4.012 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp 4.507 miliar pada tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa Sumba Timur memiliki kontribusi ekonomi terbesar di Pulau Sumba. Sementara itu, Sumba Tengah memiliki nilai PDRB terendah dibandingkan kabupaten lainnya selama periode tahun 2021–2025, yakni hanya sebesar Rp 882 miliar pada tahun 2025. Kesenjangan yang cukup mencolok antara Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Tengah ini memperkuat urgensi penelitian mengenai efektivitas transfer fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di kawasan yang secara struktural masih tertinggal. Laju pertumbuhan di setiap kabupaten cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun, namun secara keseluruhan tetap menunjukkan tren yang positif.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan, seperti penelitian Syafira *et al.*, (2022) menyimpulkan DAU berpengaruh terhadap IPM, sementara itu, DAK dan DBH tidak berpengaruh terhadap IPM, lebih lanjut penelitian syafira memasukkan PAD dan Belanja Modal sebagai variabel independen. Berbeda dengan penelitian ini dengan variabel dependen yang menggunakan IPM dan PDRB sebagai indikator pembangunan daerah. Sejalan dengan penelitian Sulastri & Efendri (2021) menganalisis pengaruh transfer fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang hanya menilai pembangunan daerah dari aspek pembangunan manusia yang diukur menggunakan IPM sedangkan penelitian ini menggunakan dua indikator kinerja pembangunan daerah, yaitu IPM dan PDRB, sehingga mampu menggambarkan pembangunan daerah tidak hanya dari aspek sosial tetapi juga dari aspek ekonomi. Selanjutnya penelitian oleh Pasaribu (2025) fokus hanya pada pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui indikator ekonomi daerah berupa kinerja keuangan daerah. Pada penelitian sebelumnya, Renggo (2019) yang meneliti hubungan transfer fiskal dan pembangunan daerah pada wilayah yang berbeda dengan karakteristik ekonomi dan fiskal di Pulau Sumba. Selain itu, penelitian tersebut dilakukan pada periode yang lebih lama sehingga belum mencerminkan kondisi transfer fiskal setelah berbagai perubahan kebijakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh transfer fiskal dari pemerintah pusat terhadap kinerja pembangunan daerah pada empat kabupaten di Pulau Sumba. Fokus penelitian diarahkan pada peran DAU, DAK, dan DBH dalam mendukung dinamika pembangunan daerah. Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran mengenai kontribusi masing-masing komponen transfer

fiskal terhadap perkembangan pembangunan daerah. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta memperkaya kajian akademik mengenai desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih relevan mengenai efektivitas transfer fiskal dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah di wilayah kepulauan dan daerah berkembang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu metode penelitian yang mengumpulkan dan mengolah data dalam bentuk angka (Lim, 2024). Data yang diperoleh dianalisis secara statistik untuk menjawab tujuan penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan (Kim, 2024; Kittur, 2023; Ramompas, 2023). Pendekatan kuantitatif menekankan penggunaan data numerik sebagai dasar dalam mengidentifikasi pola, hubungan, serta pengaruh antar variabel penelitian (Lim, 2024). Dengan demikian, hasil penelitian dapat diukur secara objektif dan menghasilkan temuan yang lebih terstruktur serta dapat diuji secara empiris (Sofya *et al.* 2024).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dengan memanfaatkan berbagai dokumen, laporan, dan publikasi resmi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Data yang digunakan berkaitan dengan variabel penelitian, yaitu data realisasi keuangan daerah yang meliputi DAU, DAK, dan DBH diperoleh dari publikasi resmi Kementerian Keuangan. Sementara itu, data IPM dan PDRB diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2021–2025. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari instansi resmi yang berwenang (Pederson *et al.*, 2020).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengolah dan menginterpretasikan data numerik untuk menjelaskan hubungan antar variabel penelitian. Proses analisis dilakukan dengan bantuan perangkat lunak *Eviews 12*. Metode analisis yang digunakan meliputi uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dilakukan melalui analisis regresi linier berganda yang mencakup uji parsial (uji t) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen, uji simultan (uji F) untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, serta uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan data panel yang mencakup empat kabupaten di Pulau Sumba, yaitu Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Sumba Tengah periode 2021-2025. Keempat kabupaten ditetapkan sebagai daerah tertinggal (Perpres No. 63/2020), sehingga cocok untuk mengevaluasi efektivitas transfer fiskal pusat terhadap kinerja pembangunan. Pulau Sumba memiliki tantangan struktural (infrastruktur terbatas, konektivitas rendah, ketergantungan pada pertanian subsisten), merefleksikan paradoks fiskal di Indonesia.

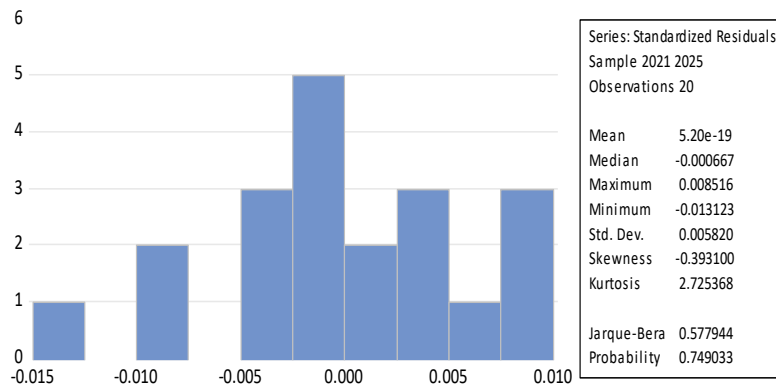
Analisis Regresi Berganda Model 1

Persamaan regresi model IPM:

$$\log IPM_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 \log DAU_{it} + \beta_2 \log DAK_{it} + \beta_3 \log DBH_{it} + \varepsilon_{it} \dots (1)$$

Uji Normalitas

Pengujian dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik *Scatter Plot*, dasar pengambilan keputusannya adalah jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari regresi atau tidak mengikuti arus garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Kusumastuti *et al.*, 2024).



Sumber: Hasil Uji *Eviews* 12 (2026)

Gambar 3. Uji Normalitas IPM

Dari hasil pengujian normalitas pada gambar 3, didapatkan nilai probabilitas adalah sebesar 0,749033 yang artinya nilai probabilitas $0,749033 > \text{nilai signifikan } (0,05)$ maka dapat disimpulkan bahwa hasilnya adalah terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas, salah satu cara yang biasa digunakan untuk mendeteksi adanya gejala *multikolinearitas* adalah dengan melihat nilai tolerance dan *variance inflation factor* (VIF) (Kalnins & Hill, 2023). Nilai yang biasa dipakai untuk melihat adanya gejala *multikolinearitas* adalah nilai *Tolerance* < 0.10 atau sama dengan nilai *VIF* > 10 (Kusumastuti *et al.*, 2024).

Tabel 2. Uji Multikolinearitas

	DAU	DAK	DBH
DAU	1.000000	0.645212	0.293055
DAK	0.645212	1.000000	0.044701
DBH	0.293055	0.044701	1.000000

Sumber: Hasil Uji *Eviews* 12 (2026)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien korelasi antara DAU dan DAK sebesar 0,645212, antara DAU dan DBH sebesar 0,293055, serta antara DAK dan DBH sebesar 0,044701. Seluruh nilai korelasi tersebut berada di bawah batas 0,85, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model penelitian. Dengan demikian, variabel DAU, DAK, dan DBH dapat digunakan secara bersama-sama

dalam model regresi karena masing-masing variabel tidak memiliki hubungan yang terlalu kuat.

Uji Heteroskedastisitas

Jika *tolerance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Kusumastuti *et al.*, 2024). Pada penelitian ini menggunakan uji *scatterplot*.

Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	172.6285	141.2365	1.222265	0.2433
LOG(DAU)	-5.272349	4.630049	-1.138724	0.2754
LOG(DAK)	-0.740138	1.045440	-0.707968	0.4915
LOG(DBH)	-0.773751	0.697524	-1.109282	0.2874

Sumber: Hasil Uji *Eviews 12* (2026)

Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan metode *Glejser* untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual model regresi (Ilori & Tanimowo, 2022). Berdasarkan hasil pengujian, nilai probabilitas (Sig.) untuk variabel *logDAU* sebesar 0,2754, *logDAK* sebesar 0,4915, dan *logDBH* sebesar 0,2874. Seluruh nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 (Kusumastuti *et al.*, 2024; Ramompas, 2023). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas atau memiliki varians residual yang konstan (homoskedastisitas).

PEMBAHASAN

Model IPM

Pengujian Pengaruh Transfer Fiskal Dari Pemerintah Pusat Terhadap Kinerja Pembangunan Daerah Empat Kabupaten di Pulau Sumba diperoleh sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \log IPMit &= \alpha_{it} + \beta_1 \log DAU_{it} + \beta_2 \log DAK_{it} + \beta_3 \log DBH_{it} + \varepsilon_{it} \\ &= 5.038887_{it} + 0.008292 \log DAU_{it} - \\ &\quad 0.016731 \log DAK_{it} - 0.028375 \log DBH_{it} + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

t-Statistic = 0.232026 -2.073459 -5.270589

Prob = 0.8201 0.0586 0.0002

Adjusted R-squared = 0.975180

F-statistic = 125.4207

Prob(F-statistic) = 0.000000

Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,975180 menunjukkan bahwa kemampuan variabel DAU, DAK, dan DBH dalam menjelaskan variasi kinerja pembangunan daerah yang diprosikan dengan IPM sebesar 97,52%, sedangkan sisanya sebesar 2,48% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai *F-statistic* sebesar 125,4207 dengan probabilitas 0,000000. Nilai probabilitas yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa secara simultan variabel DAU, DAK, dan DBH berpengaruh terhadap kinerja pembangunan daerah pada empat kabupaten di Pulau

Sumba. Dengan demikian, model regresi yang digunakan telah mampu menjelaskan hubungan antara transfer fiskal dari pemerintah pusat dengan kinerja pembangunan daerah.

Karena secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, maka perlu dilakukan uji parsial (uji t) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara terpisah terhadap kinerja pembangunan daerah (Siegel & Wagner, 2022). Hasil uji tersebut adalah sebagai berikut:

Dana Alokasi Umum memiliki nilai probabilitas sebesar $0,8201 > 0,05$, sehingga menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pembangunan daerah pada empat kabupaten di Pulau Sumba. Meskipun koefisien regresinya bernilai positif sebesar $0,008292$, pengaruh tersebut secara statistik tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum belum secara langsung mampu meningkatkan IPM.

Dana Alokasi Khusus memiliki nilai probabilitas sebesar $0,0586 > 0,05$, sehingga menunjukkan bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pembangunan daerah pada tingkat signifikansi 5 persen. Koefisien regresi yang bernilai negatif sebesar $-0,016731$ mengindikasikan bahwa peningkatan DAK cenderung diikuti oleh penurunan IPM, namun hubungan tersebut tidak cukup kuat secara statistik untuk menyatakan adanya pengaruh yang signifikan.

Dana Bagi Hasil memiliki nilai probabilitas sebesar $0,0002 < 0,05$, sehingga menunjukkan bahwa DBH berpengaruh signifikan terhadap kinerja pembangunan daerah pada empat kabupaten di Pulau Sumba. Koefisien regresi yang bernilai negatif sebesar $-0,028375$ menunjukkan bahwa setiap peningkatan Dana Bagi Hasil sebesar 1 persen akan menurunkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar $0,028375$ persen, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan DBH belum sepenuhnya diarahkan pada sektor-sektor yang mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

Pengaruh DAU terhadap IPM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU memiliki koefisien positif sebesar $0,008292$, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM dengan nilai probabilitas sebesar $0,8201 (>0,05)$. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan DAU belum mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia secara nyata pada empat kabupaten di Pulau Sumba selama periode 2021–2025. Kondisi tersebut dapat terjadi karena sebagian besar penggunaan DAU masih diarahkan untuk membiayai belanja rutin pemerintah daerah, seperti belanja pegawai dan operasional pemerintahan, sehingga dampaknya terhadap peningkatan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat tidak langsung dirasakan. Meskipun DAU merupakan dana yang bersifat fleksibel (*block grant*), efektivitasnya sangat bergantung pada prioritas penganggaran pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Syafira *et al.*, (2022) dan Arrosyid & Bawono (2025) yang menemukan bahwa DAU tidak memberikan pengaruh yang kuat terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia ketika alokasi anggaran lebih banyak digunakan untuk kebutuhan administratif pemerintah sehingga manfaatnya terhadap kesejahteraan masyarakat tidak dapat dirasakan secara langsung dalam jangka pendek. Temuan ini mendukung teori *Fiscal Federalism Theory* yang disampaikan oleh Oates bahwa DAU diberikan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam menyediakan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Namun, efektivitas transfer tersebut sangat bergantung pada kualitas tata kelola dan prioritas pengeluaran pemerintah daerah

masing-masing (Isman, Salomo & Bakri, 2025; Ponce-Rodríguez *et al.*, 2020; Shah & Dita, 2012).

Namun hasil ini berbeda dengan penelitian Sulastri dan Efendri (2021) yang menemukan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Kalimantan. Perbedaan hasil tersebut diduga disebabkan oleh perbedaan karakteristik wilayah, kapasitas fiskal daerah, serta efektivitas pengelolaan dana transfer di masing-masing daerah. Adapun hasil penelitian Martina, Irwan, dan Fatimah (2025) di Provinsi Nusa Tenggara Barat menemukan dan mendukung penelitian ini, secara langsung DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh DAU terhadap pembangunan manusia lebih banyak terjadi melalui mekanisme belanja pembangunan atau belanja modal. Dengan kata lain, apabila DAU tidak diarahkan pada program-program produktif yang meningkatkan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar, maka dampaknya terhadap IPM menjadi sangat terbatas.

Dari perspektif pembangunan manusia, temuan ini menunjukkan adanya fenomena *flypaper effect*, yaitu kondisi ketika transfer dari pemerintah pusat lebih banyak "menempel" pada pengeluaran birokrasi dibandingkan digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat (Nurmansyah & Tandean, 2024; Wati, Ispriyahadi, & Zakaria, 2022). Akibatnya, peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui DAU tidak sepenuhnya diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya secara teoritis, temuan ini menunjukkan bahwa besarnya dana transfer belum tentu secara otomatis meningkatkan kualitas pembangunan manusia apabila tidak disertai dengan pengalokasian anggaran yang efektif pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar masyarakat.

Pengaruh DAK terhadap IPM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAK memiliki koefisien negatif sebesar -0,016731 dengan probabilitas 0,0586 ($>0,05$), sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di empat kabupaten Pulau Sumba.

Secara teoritis, DAK seharusnya mampu meningkatkan IPM karena dana ini ditujukan untuk mendanai program-program prioritas nasional, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar sehingga bersifat *specific grant*. Berdasarkan teori *Fiscal Federalism* yang dikemukakan oleh Oates, transfer yang bersifat spesifik seperti DAK seharusnya memiliki efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan transfer umum karena penggunaannya telah diarahkan pada sektor-sektor strategis yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat (Isman, Salomo & Bakri, 2025; Nurmansyah & Tandean, 2024; Nawawi, Jaya & Pangaribowo, 2021). Akan tetapi, dalam penelitian ini pengaruh tersebut belum terlihat secara signifikan. Hal ini dapat disebabkan karena manfaat pembangunan yang dibiayai DAK memerlukan waktu yang relatif panjang untuk menghasilkan perubahan pada indikator pembangunan manusia.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Renggo (2019) yang menemukan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perbedaan tersebut dapat terjadi karena cakupan wilayah penelitian Renggo lebih luas dan periode penelitian yang digunakan lebih panjang. Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian yang menemukan bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM pada beberapa kabupaten tertinggal di kawasan Indonesia Timur (Nashshar & Mulyana, 2022; Soraya & Qibthiyah, 2021). Penelitian tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar program DAK masih berorientasi pada pembangunan fisik sehingga manfaatnya terhadap pembangunan manusia memerlukan waktu yang relatif panjang untuk terwujud. Hal serupa dijelaskan oleh Taniboyong dan Prasasyaningsih (2024) bahwa DAK belum memberikan

pengaruh signifikan terhadap IPM karena masih terdapat ketidaksesuaian antara prioritas program DAK dengan kebutuhan riil masyarakat di daerah.

Selain itu, karakteristik empat kabupaten di Pulau Sumba yang masih menghadapi berbagai ketimpangan infrastruktur dan pelayanan publik dapat menyebabkan dampak DAK terhadap IPM belum optimal. Selain itu karena pemanfaatan dana belum sepenuhnya diarahkan, pengelolaan lemah, alokasi antar bidang tidak tepat, dan belanja belum fokus pada dimensi inti IPM seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Dalam perspektif teori pertumbuhan ekonomi Rostow, investasi yang efektif harus difokuskan pada sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan efek pengganda bagi perekonomian. Penjelasan lain dapat dilihat dari perspektif teori pembangunan manusia (*Human Development Theory*) yang dikemukakan oleh Sen (2000). Teori ini menekankan bahwa pembangunan manusia tidak hanya ditentukan oleh penyediaan infrastruktur fisik, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi yang tersedia. Dengan demikian, meskipun DAK berhasil meningkatkan ketersediaan fasilitas publik, peningkatan IPM belum tentu terjadi apabila kualitas layanan, aksesibilitas, dan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas tersebut masih rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan alokasi DAK perlu diiringi dengan perencanaan dan pengawasan yang lebih baik agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Pengaruh DBH terhadap IPM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DBH berpengaruh signifikan terhadap IPM dengan nilai probabilitas sebesar 0,0002 ($<0,05$), namun memiliki arah hubungan negatif dengan koefisien sebesar -0,028375. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan DBH justru diikuti oleh penurunan IPM pada empat kabupaten di Pulau Sumba. Artinya jika DBH meningkat maka IPM cenderung menurun. Temuan penelitian ini menarik karena berbeda dengan hasil penelitian Ina dan Hudang (2024) menunjukkan bahwa DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya Juniantari dan Purwadinata (2026) menyimpulkan bahwa pengaruh positif dan signifikan menunjukkan bagi hasil penerimaan mampu meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Temuan penelitian ini justru lebih dekat dengan hasil penelitian Siburian (2021) yang menemukan bahwa DBH memiliki hubungan negatif terhadap IPM. Perbedaan ini menunjukkan bahwa karakteristik daerah sangat mempengaruhi efektivitas penggunaan DBH. Pada Pulau Sumba, perubahan nilai DBH ternyata memiliki hubungan yang signifikan dengan perubahan IPM, meskipun arah pengaruhnya negatif. DBH lebih banyak digunakan untuk belanja administratif, pembangunan fisik yang tidak terkait langsung dengan pembangunan manusia, atau bahkan terjadi inefisiensi pengelolaan anggaran (Abae, Ahmad, & Mala, 2025). Sejalan dengan penelitian Fahrezy, Tampubolon, & Muda (2025) bahwa DBH tidak memiliki ketentuan penggunaan yang spesifik seperti DAK. Akibatnya sebagian besar DBH dapat dialokasikan pada belanja rutin, perjalanan dinas, honorarium, atau belanja birokrasi yang tidak secara langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Temuan ini mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap pengelolaan DBH agar dana yang diterima dapat lebih difokuskan pada sektor-sektor yang secara langsung mendukung pembangunan manusia serta dimungkinkan. Oleh karena itu peningkatan DBH belum tentu meningkatkan IPM. Selain itu ketika ketergantungan fiskal meningkat, pemerintah daerah cenderung berorientasi pada penyerapan anggaran dibandingkan pencapaian *outcome* pembangunan manusia (Paulina & Adiawaty, 2025). Kondisi ini menyebabkan tambahan DBH tidak mampu meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat yang

merupakan komponen utama IPM. Akibatnya peningkatan DBH justru tidak diikuti oleh peningkatan IPM.

Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa efektivitas DBH sangat dipengaruhi oleh karakteristik daerah dan pola pengelolaan anggaran. Pada tingkat Provinsi NTT secara keseluruhan, tambahan DBH mampu meningkatkan kualitas layanan publik. Namun pada kasus empat kabupaten di Pulau Sumba, tambahan DBH justru belum berhasil diterjemahkan menjadi peningkatan pembangunan manusia. Selain itu, porsi DBH yang relatif kecil dibandingkan DAU dan DAK menyebabkan penggunaannya lebih banyak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan anggaran daerah daripada untuk program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

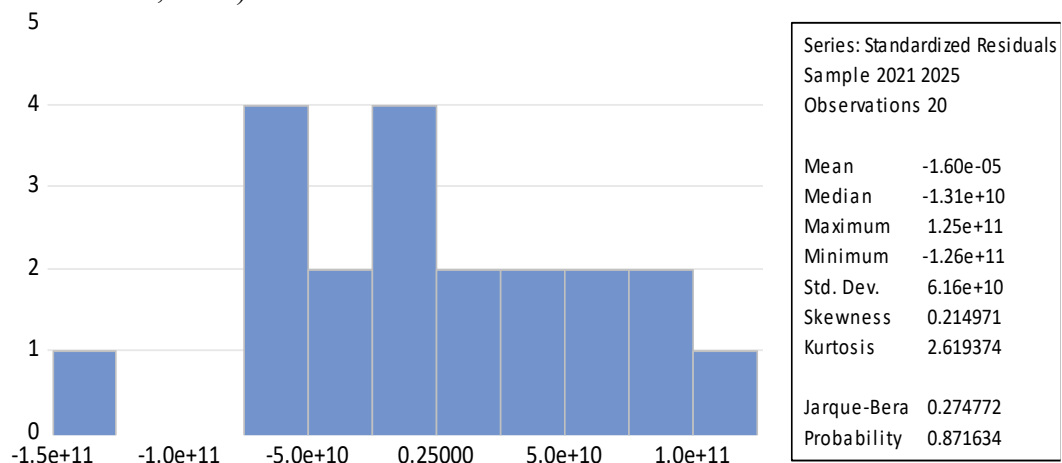
Analisis Regresi Linear Berganda Model 2

Persamaan regresi model PDRB:

$$PDRB = \alpha_{it} + \beta_1 DAU_{it} + \beta_2 DAK_{it} + \beta_3 DBH_{it} + \varepsilon_{it} \dots (2)$$

Uji Normalitas

Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal (Kusumastuti *et al.*, 2024).



Sumber: Hasil Uji *Eviews* 12 (2026)

Gambar 4. Uji Normalitas PDRB

Dari hasil pengujian normalitas pada gambar 4.2 didapatkan nilai probabilitas adalah sebesar 0,871634 yang artinya nilai probabilitas 0, 871634 > nilai signifikan (0,05) maka dapat disimpulkan bahwa hasilnya adalah terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

	DAU	DAK	DBH
DAU	1.000000	0.478251	0.115184
DAK	0.478251	1.000000	0.580275
	0.115	0.5802	1.0000
DBH	184	75	00

Sumber: Hasil Uji *Eviews* 12 (2026)

Berdasarkan tabel 4, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai korelasi antar variabel independen DAU, DAK, dan DBH berada di bawah batas kritis pada angka 0,80. Nilai korelasi antara DAU dan DAK sebesar 0,478251, antara DAU dan DBH sebesar 0,115184, serta antara DAK dan DBH sebesar 0,580275. Karena seluruh nilai korelasi antar variabel independen lebih kecil dari 0,80, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami masalah multikolinearitas. Dengan demikian, variabel DAU, DAK, dan DBH dapat digunakan secara simultan dalam model regresi untuk menganalisis pengaruh transfer fiskal terhadap IPM dan PDRB pada empat kabupaten di Pulau Sumba.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan *tolerance* dan residual suatu persamaan kepengamatan yang lain (Kusumastuti *et al.*, 2024).

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.05E+11	2.02E+11	0.519883	0.6119
DBH	-0.188610	3.513390	-0.053683	0.9580
DAU	-0.051437	0.352767	-0.145809	0.8863
DAK	-0.139333	0.191785	-0.726508	0.4804

Sumber: Hasil Uji *Eviews* 12 (2026)

Hasil uji heteroskedastisitas pada model PDRB menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel DBH sebesar 0,9580, DAU sebesar 0,8863, dan DAK sebesar 0,4804. Seluruh nilai probabilitas tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan. Dengan demikian, model regresi panel yang menganalisis pengaruh transfer fiskal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) telah memenuhi asumsi homoskedastisitas dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Model PDRB

Pengujian Pengaruh Transfer Fiskal Dari Pemerintah Pusat Terhadap Kinerja Pembangunan Daerah Empat Kabupaten di Pulau Sumba diperoleh sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 PDRB_{it} &= \alpha_{it} + \beta_1 DAU_{it} + \beta_2 DAK_{it} + \beta_3 DBH_{it} + \varepsilon_{it} \\
 &= 1.83E + 12_{it} + 1.545412DAU_{it} - 0.473378DAK_{it} - \\
 &\quad 19.12783DBH_{it} + \varepsilon_{it} \\
 \text{t-Statistic} &= 2.156838 \quad -1.215220 \quad -2.680407 \\
 \text{Prob} &= 0.0503 \quad 0.2459 \quad 0.0189 \\
 \text{Adjusted R-squared} &= 0.996810 \\
 \text{F-statistic} &= 990.6485 \\
 \text{Prob(F-statistic)} &= 0.000000
 \end{aligned}$$

Nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan oleh *Adjusted R-squared* sebesar 0,975180 menunjukkan bahwa variasi kinerja pembangunan daerah yang diprosikan dengan IPM mampu dijelaskan oleh variabel DAU, DAK, dan DBH sebesar 97,52%, sedangkan sisanya sebesar 2,48% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai *F-statistic* sebesar 125,4207 dengan nilai probabilitas 0,0000. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Nilai probabilitas yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa variabel DAU, DAK, dan DBH secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pembangunan daerah pada empat kabupaten di Pulau Sumba.

Karena variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen, maka perlu dilakukan uji parsial (uji t) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kinerja pembangunan daerah. Hasil uji tersebut adalah sebagai berikut:

Dana Alokasi Umum memiliki nilai probabilitas sebesar $0,8201 > 0,05$, sehingga menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pembangunan daerah pada empat kabupaten di Pulau Sumba. Meskipun koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,008292, peningkatan DAU sebesar 1 persen hanya akan meningkatkan IPM sebesar 0,008292 persen dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Namun, pengaruh tersebut secara statistik tidak signifikan.

Dana Alokasi Khusus memiliki nilai probabilitas sebesar $0,0586 > 0,05$, sehingga menunjukkan bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pembangunan daerah pada tingkat signifikansi 5 persen. Koefisien regresi yang bernilai negatif sebesar -0,016731 menunjukkan bahwa setiap peningkatan DAK sebesar 1 persen akan menurunkan IPM sebesar 0,016731 persen dengan asumsi variabel lain tetap. Akan tetapi, karena nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik.

Dana Bagi Hasil memiliki nilai probabilitas sebesar $0,0002 < 0,05$, sehingga menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap kinerja pembangunan daerah pada empat kabupaten di Pulau Sumba. Koefisien regresi sebesar -0,028375 menunjukkan bahwa setiap peningkatan DBH sebesar 1 persen akan menurunkan IPM sebesar 0,028375 persen dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Dengan demikian, Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja pembangunan daerah.

Pengaruh DAU terhadap PDRB

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU memiliki hubungan positif terhadap PDRB dengan koefisien sebesar 1,545412, tetapi tidak berpengaruh signifikan karena memiliki probabilitas sebesar $0,0503 (>0,05)$. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan DAU belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara nyata pada empat kabupaten di Pulau Sumba. Hal ini diduga karena sebagian besar DAU masih digunakan untuk belanja rutin pemerintah sehingga belum memberikan dampak yang kuat terhadap peningkatan aktivitas ekonomi produktif.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Pasaribu (2025) yang menyatakan bahwa dana perimbangan belum tentu secara langsung meningkatkan kinerja ekonomi daerah apabila belum dikelola secara produktif. Namun hasil ini berbeda dengan penelitian Renggo, (2019) yang menemukan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Nusa Tenggara Timur. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas DAU dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan keuangan daerah dan prioritas pembangunan masing-masing wilayah.

Pengaruh DAK terhadap PDRB

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB dengan nilai probabilitas sebesar $0,2459 (>0,05)$. Tidak signifikannya pengaruh DAK

menunjukkan bahwa pembangunan yang dibiayai melalui DAK belum mampu meningkatkan aktivitas ekonomi daerah dalam jangka pendek. Sebagian besar proyek yang dibiayai DAK berupa pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang manfaat ekonominya baru dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Penelitian yang dilakukan oleh Nuryadin & Suharsih (2017) menemukan bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Indonesia dalam jangka pendek. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sebagian besar program DAK masih berfokus pada pembangunan pelayanan dasar sehingga efeknya terhadap peningkatan output ekonomi memerlukan waktu yang lebih panjang. Hal serupa sejalan dengan Pasaribu (2025) yang menemukan bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap indikator pembangunan ekonomi di beberapa daerah di Sumatera Utara. Karakteristik penggunaan DAK yang umumnya lebih diarahkan untuk memenuhi standar pelayanan minimum serta pembangunan sarana dan prasarana dasar. Akibatnya, manfaat ekonomi yang dihasilkan cenderung tidak langsung terlihat dalam jangka pendek

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Renggo, (2019) yang menemukan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Perbedaan tersebut kemungkinan disebabkan oleh perbedaan periode penelitian dan karakteristik daerah penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan DAK dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi membutuhkan waktu serta dukungan kebijakan pembangunan lainnya agar manfaat ekonomi dapat berkembang secara optimal. Selain itu periode pengamatan penelitian yang relatif singkat, yaitu tahun 2021–2025, kemungkinan belum mampu menangkap seluruh efek pembangunan yang dihasilkan oleh DAK.

Pengaruh DBH terhadap PDRB

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DBH berpengaruh signifikan terhadap PDRB dengan nilai probabilitas sebesar 0,0189 ($<0,05$), namun memiliki arah hubungan negatif dengan koefisien sebesar -19,12783.

Hubungan negatif ini menunjukkan bahwa peningkatan DBH diikuti oleh penurunan PDRB. Kondisi tersebut dapat mengindikasikan bahwa pemanfaatan DBH belum diarahkan secara optimal pada sektor-sektor produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, nilai DBH yang terus menurun setelah implementasi UU HKPD Tahun 2022 juga dapat mempengaruhi kemampuan daerah dalam mendukung kegiatan ekonomi.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Pasaribu (2025) yang menunjukkan bahwa dana perimbangan secara umum memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keuangan daerah. Namun pada konteks Pulau Sumba, DBH justru menunjukkan hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas penggunaan DBH agar dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan pertumbuhan PDRB.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh transfer fiskal dari pemerintah pusat terhadap kinerja pembangunan daerah pada empat kabupaten di Pulau Sumba periode 2021–2025, dapat disimpulkan bahwa transfer fiskal yang terdiri atas Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja pembangunan daerah yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Regional Bruto. Namun secara individual, DAU dan DAK tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap IPM maupun PDRB. Sementara itu, DBH terbukti

berpengaruh signifikan, tetapi dengan arah hubungan yang negatif terhadap kinerja pembangunan daerah.

Temuan ini menunjukkan bahwa besarnya transfer fiskal yang diterima daerah belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi secara optimal. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan, alokasi, dan pemanfaatan dana transfer perlu ditingkatkan agar dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah di Pulau Sumba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abae, I., Ahmad, A. C., & Mala, S. (2025). Beyond Resource Abundance: Evaluating The Impact of Mining and Fiscal Transfers on Regional Sustainable Development Index. *EcoProfit: Sustainable and Environment Business*. 3(1), 1-16. <https://doi.org/10.61511/ecoprofit.v3i1.2025.1969>
- Agastha, M. E., & Rahman, Y. A. (2025). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Pulau Jawa Tahun 2017–2024. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*. 4(8), 2297–2314. <https://doi.org/https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i8.3292>
- Ardiansyah, R., & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*. 1(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Arrosyid, C. F & Bawono, A. D. B. (2025). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 4 (4), 880-889. doi.10.54259/akua.v4i4.5760
- Astuti, R. W., & Purwiyanta. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Pantura Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*. 7(1), 140-152.
- Fahrezy, S., Tampubolon, D. P., & Muda, I. (2025). Analysis of Revenue Sharing Fund (DBH) Realization in Deli Serdang Regency Fiscal Year 2024. 4(1), 40-49. <https://doi.org/10.62668/jiar.v4i01.1783>
- Hazmi, D., Karimi, S., & Muharja, F. (2023). Measuring and Determinants of Inclusive Growth: Evidence from Indonesia. *Optimum: Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*. 12(2), 135-154. <https://doi.org/10.12928/optimum.v12i2.5984>
- Ilori, O. O., & Tanimowo, F. O. (2022). Heteroscedasticity Detection in Cross-Sectional Diabetes Pedigree Function: A Comparison of Breusch-Pagan-Godfrey, Harvey and Glejser Tests. *International Journal of Scientific and Management Research*. 5(12), 150-163. <https://doi.org/10.37502/ijsmr.2022.51211>
- Ina, Y. T., & Hudang, A. K. (2024). Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmiah Global Education*. 5(2), 1234–1245. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2718>
- Juniantari, R., & Purwadinata, S. (2026). Pengaruh PAD, DAK dan DBH Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening: Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2015-2024. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 19(1), 261-271. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v19i1.1042>
- Kalnins, A., & Hill, K. P. (2023). The VIF Score. What is it Good For? Absolutely Nothing. *Organizational Research Methods*, 28(1), 58 - 75. <https://doi.org/10.1177/10944281231216381>

- Kesuma, A. R., Rinanda, F. A., Astafira, I., Afriani, N., Fadlirhohim, R. D., Lestari, T. S. A., & Sifriyani. (2024). Pemodelan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia Periode 2018-2021 dengan Analisis Regresi Data Panel. *ESTIMASI: Journal of Statistics and Its Application*. 5(2), 216–229.
- Kim, J., Kim, D. H., & Kwak, S. (2024). Comprehensive guidelines for appropriate statistical analysis methods in research. *Korean Journal of Anesthesiology*, 77, 503 - 517. <https://doi.org/10.4097/kja.24016>
- Kittur, Javeed. (2023). Conducting Quantitative Research Study: A Step-by-Step Process. *Journal of Engineering Education Transformations*. 36(4), 100-112. <https://doi.org/10.16920/jeeet/2023/v36i4/23120>
- Kusumastuti, S. Y., Nurhayati., Faisal, A., Rahayu, D. H., & Hartini. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif (Panduan Lengkap Penulisan untuk Karya Ilmiah Terbaik)*. Jakarta: Penerbit Sonpedia Publishing Indonesia.
- Lim, W. M. (2024). What Is Quantitative Research? An Overview and Guidelines. *Australasian Marketing Journal*, 33(3), 325 - 348. <https://doi.org/10.1177/14413582241264622>
- Martina, M., & Fatimah, S. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap IPM di Provinsi NTB dengan Belanja Modal Sebagai Varabel Intervening. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science*. 3(2), 143-156.
- Nashshar, M. I., & Mulyana, B. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi. *Indonesian Treasury Review (ITRev): Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*. 7(3), 255–270.
- Nawawi, A., Jaya, W., & Pangaribowo, E. (2021). The Impact of Fiscal Policy on Welfare Improvement in Indonesia: Study of Impact of Premium Assistance Beneficiaries on The National Health Insurance, Physical Special Allocation Fund for Health Sector, Education Sector, and Village Funds to Human Development Index. *Populasi*. 29(2), 46-64. <https://doi.org/10.22146/jp.71691>
- Nofitiana, S., Huda, S., & Perdana, P. (2024). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. 6(12), 7991-8003. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i12.4647>
- Nurmansyah, F., & Tandean, V. (2024). Analisis Dana Transfer Pemerintah Pusat Dalam Memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Otonomi Khusus. *Jurnal Budget : Isu dan Masalah Keuangan Negara*. 9(1), 35-54. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v9i1.192>
- Pasaribu, S. H. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*. 2(1), 378–384.
- Paulina & Adiawaty, S. (2025). Fiscal Transfers and the Persistence of Regional Inequality: A Critical Review of Indonesia's Intergovernmental Funding System. *Moneta : Journal of Economics and Finance*. 3(4), 283–296. <https://doi.org/10.61978/moneta.v3i4.822>
- Pederson, L., Vingilis, E., Wickens, C. L., Koval, J., & Mann, R. (2020). Use of secondary data analyses in research: Pros and Cons. *Journal of Addiction Medicine and Therapeutic Science*. 6(1), 058-060. <https://doi.org/10.17352/2455-3484.000039>
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. (2005).

- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal (2024).
- Ponce-Rodríguez, R. A., Hankla, C. R., Martínez-Vázquez, J., & Heredia-Ortiz, E. (2020). The politics of fiscal federalism: Building a stronger decentralization theorem. *Journal of Theoretical Politics*, 32(4), 605 - 639. <https://doi.org/10.1177/0951629820956287>
- Ramompas, Y., & Putra, W. (2023). Analisis Pengaruh Hutang Luar Negeri, Penanaman Modal Asing, Ekspor dan Remitansi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di 8 Negara ASEAN. *JUREKA: Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 2(2), 87-95. <https://doi.org/10.35334/jureka.v2.i2.131>
- Renggo, Y. R. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pembangunan Daerah Di Propinsi Nusa Tenggara Timur. *AKRAB JUARA: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*. 4, 31–46.
- Safar, M. A. (2023). Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *INDEPENDENT: Jurnal Of Economics*. 3(3), 68–75.
- Sabilla, T. M., & Sumarsono, H. (2022). Pengaruh belanja pemerintah, pendapatan asli daerah, penanaman modal dalam negeri, indeks pembangunan manusia terhadap PDRB. *FORUM EKONOMI*. 24(1), 54-64. <https://doi.org/10.30872/jfor.v24i1.10382>
- Sarpina, S., Putri, A. K., & Suroso, H. (2021). Tendensi dan komparasi Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. *SOROT: Jurnal ilmu-ilmu sosial*. 6(1), 25-32. <https://doi.org/10.31258/sorot.16.1.25-32>
- Sen, A. (2000). *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf.
- Shah, A., Qibthiyyah, R., & Dita, A. (2012). General purpose central-provincial-local transfers (DAU) in Indonesia : from gap filling to ensuring fair access to essential public services for all. *Social Science Research Network*, 1-36. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-6075>
- Siburian, M.T., Abdulah, M. A., & Firmansyah, A. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011—2018, *Tirtayasa Ekonomika*. 16(1), 1-16. <https://dx.doi.org/10.35448/jte.v16i1.11149>
- Siegel, A. F., & Wagner, M. R. (2022). Chapter 12 - Multiple Regression: Predicting One Variable From Several Others. *Practical Business Statistics (Eighth Edition)*. 371-431. doi: 10.1016/b978-0-12-820025-4.00012-9
- Sofya, A., Novita, N. C., Afgani, M. W., & Isnaini, M. (2024). *Metode Survey: Explanatory Survey dan Cross Sectional dalam Penelitian Kuantitatif*. 4(3), 1695–1708.
- Soraya, A. P., & Qibthiyyah, R. (2021). The Affirmation Special Allocation Fund and Regional Economic in Indonesia. *Journal of Economics and Policy*. 13(2), 433-446. <https://doi.org/10.15294/jejak.v13i2.25990>
- Sulastri, E., & Efendri. (2021). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Seluruh Provinsi Di Kalimantan Tahun Anggaran 2015-2019. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*. 6(2), 85–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.36407/jrmb.v6i2.572>
- Suryani. (2024). *Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengangguran, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Nusa Tenggara Barat*. 7, 5975–5988.
- Susila, M. R. (2024). Peranan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Memediasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. 13(2), 287–304. <https://doi.org/10.14414/jbb.v13i2.4458>

- Susilowati, D., Suman, A., Susilo, S., & Prasetyia, F. (2025). Inclusiveness of Economic Development in the Multidimensional Perspective in Provinces in Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*. 26(2), 360-384. <https://doi.org/10.18196/jesp.v26i2.27485>
- Syafira, L., Harefa, K., Hidayat, O. S., & Habibi, M. R. (2022). Analisis PAD, DAU, DAK, DBH Dan Belanja Modal Serta Pengaruhnya Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya*. 8(1), 80–89. <https://doi.org/10.47663/abep.v8i1.235>
- Taniboyong, A. T., & Prasasyaningsih, X. I. (2024). Dampak Penerimaan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua. *Prosiding Seminar Nasional Forum Manajemen Indonesia*. 2, 1502-1513. - e-ISSN 3026-4499. <https://doi.org/10.47747/snfmi.v2i1.2410>
- Undang-Undang Republik Indonesia 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (2004).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa (1999).
- Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (2022).
- Wati, L. N., Ispriyahadi, H., & Zakaria, D. (2022). The Flypaper Effect Phenomenon of Intergovernmental Transfers During The Covid-19: Evidence from Indonesia. *Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu/Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business*. 40(2), 353-373. <https://doi.org/10.18045/zbefri.2022.2.353>